

EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEGIATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH KABUPATEN GARUT

Rd. Ade Purnawan^{1*}, Rifad Rahadian², Nurbudiwati³
^{1,2,3} Universitas Garut, Indonesia

*Korespondensi: rd.purnawan@uniga.ac.id

ABSTRAK

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah banyak yang belum melengkapi izin usaha, juga terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut membuat proses pendataan yang dilakukan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut tersebut menjadi terhambat, Padahal program pembinaan dari tahun 2017 sampai 2021 sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi program Ppembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten. Garut dengan Model Evaluasi Context, Evaluasi Input, Evaluasi Process dan Evaluasi Product (CIPP) dan dampak program pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Karangpawitan.. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, data didapatkan melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan penelitian 2 orang pegawai Dinas Koperasi dan UMKM, 1 orang Kepala Seksi PMD di Kecamatan Karangpawitan, 6 orang pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai sasaran program, Hasil penelitian dengan menggunakan metode Evaluasi Model CIPP yaitu Evaluasi Konteks menyebutkan bahwa program ini sejalan dengan tujuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Evaluasi Masukan meliputi Perencanaan program, SDM Aparatur, Sarana dan Fasilitasi. Evaluasi Proses meyebutkan bahwa proses pelaksanaan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan PUMKM. Evaluasi Hasil menyebutkan Munculnya Ide-ide baru menandakan hasil program pembinaan sudah dapat dirasakan oleh PUMKM.

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan, Usaha Mikro Kecil Menengah, Evaluasi Process dan Evaluasi Product (CIPP)

ABSTRACT

Many Micro, Small and Medium Enterprises have not completed business permits, as well as limited human resources at the Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises of the Garut Regency, which has hampered the data collection process carried out by the Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises of the Garut Regency, even though the coaching program from 2017 to 2021 has been carried out by the Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises of Garut Regency. The purpose of this study was to evaluate the Micro, Small and Medium Enterprise Development program carried out by the District Office of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises. Garut with the Context Evaluation Model, Input Evaluation, Process Evaluation and Product Evaluation (CIPP) and the impact of the coaching program on Micro, Small and Medium Enterprises in Karangpawitan District. The

research method uses a qualitative approach, data obtained through documentation studies, observations and interviews. Research informants 2 employees of the Office of Cooperatives and SMEs, 1 PMD Section Head in Karangpawitan District, 6 Micro, Small and Medium Enterprises actors as program targets. The results of the study using the CIPP Model Evaluation method, namely Context Evaluation, stated that this program was in line with the objectives of the Cooperative Office. and Micro, Small and Medium Enterprises Input Evaluation includes program planning, Apparatus HR, Facilities and Facilitation. Process Evaluation states that the implementation process is in accordance with what PUMKM requires. Evaluation of the results stated that the emergence of new ideas indicated that the results of the coaching program could be felt by PUMKM.

Keywords : *Evaluation , Coaching, Micro Small and Medium Enterprises, Process Evaluation and Product Evaluation (CIPP).*

A. PENDAHULUAN

Dalam era Globalisasi ini yang menjadi tujuan utama dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah mengurangi berbagai hambatan dalam perdagangan yang mengedepankan ide dan prakarsa masyarakat secara luas. Sebagaimana ditetapkan pada Undang – Undang No.20 Tahun 2008 tentang pengembangan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumberdaya produktif, pengembangan kewirausahaan, pengusaha kecil, menengah, koperasi berkeunggulan kompetitif..

Menurut data dari Kecamatan Karang pawitan Kabupaten Garut pelaku usaha industri kecil / UMKM di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut hingga saat ini sudah sekitar 2.972 UMKM dengan berbagai jenis usaha.

Dengan jumlah pelaku usaha UMKM yang bisa dikatakan cukup banyak itu daerah karangpawitan diharapkan dapat berkembang dan mandiri dari segi ekonomi serta pembangunannya, kemudian mampu menciptakan perekonomian daerah dan ikut serta dalam pembangunan fisik maupun non fisik, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan asas

diberlakukannya desentralisasi yang memberikan otonomi kepada masing-masing pemerintah daerah guna membantu kinerja pemerintah pusat.

Peningkatan dan Perkembangan UMKM itu sendiri merupakan bentuk dari pemanfaatan ide dan prakarsa masyarakat secara luas, sehingga memunculkan kreatifitas untuk mengeksplor potensi-potensi yang ada di wilayah Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Keberadaan UMKM ini diharapkan mampu menciptakan peluang usaha serta inovasi yang kreatif dan menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap konsumen. Di sisi lain pemerintah pun harus ikut andil dalam proses peningkatan dan perkembangan UMKM tersebut dengan memberikan kajian-kajian kepada para pelaku usaha lewat seminar – seminar yang dilakukan ditiap daerah guna untuk memperluas wawasan bagi para pelaku usaha. Keterbatasan lapangan pekerjaan yang berada di daerah maupun kota, membuat Pemerintah mengadakan berbagai usaha demi meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbentuk program pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan dalam bidang ekonomi yang tertulis pada Peraturan Daerah Nomor : 76 Tahun 2016

tentang Pola Dasar Pembangunan di Kabupaten Garut. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembinaan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut memiliki serangkaian program pembinaan pada bidang ekonomi antara lain meningkatkan produktivitas serta kapasitas produksi pertanian dan hortikultura khususnya produk-produk unggulan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian, potensi alam dan kelompok tani.

Selain itu, program lain yang menjadi tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni melalui peningkatan taraf perekonomian masyarakat, khususnya peningkatan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan lembaga keuangan desa, lembaga usaha ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019, dalam proses pelaksanaan program kegiatan dibidang ekonomi, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut memiliki program yang bertujuan untuk mendukung kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya : Mengadakan penyuluhan dengan cara sosialisasi program-program pemerintah melalui pertemuan-pertemuan di desa, door to door, pengajian-pengajian, orang per orang ataupun melalui tokoh-tokoh masyarakat dan lain-lain. Dalam hal ini maksud dari pertemuan – pertemuan di desa adalah pada saat dilaksanakannya Musrenbang desa ataupun Musrenbang kecamatan yang dimana pada saat itu membahas tentang perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu satu tahun kedepan yang menyangkut kemajuan desa baik dari pembangunan ataupun dalam peningkatan sumber daya.

Mengadvokasi dan memfasilitasi kelompok-kelompok usaha atau perorangan kepada dinas/instansi atau bank

terkait agar dapat diberikan bantuan modal usaha. Dalam hal ini Dinas Koperasi & UMK Kabupaten Garut sebenarnya tidak memberikan bantuan modal dalam bentuk uang atau materi karena, mungkin kesiapan dari Dinas Koperasi & UMK Kabupaten Garut masih belum siap untuk memberikan modal berupa materi / uang. Selanjutnya, memfasilitasi proses perijinan agar mudah dan murah sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya : SIUP, SITU, NPWP, IUMKM dan lain-lain.:

Kemudian program pembinaan selanjutnya yakni berupa pelatihan yang ditujukan kepada pelaku usaha UMKM dalam bentuk pelatihan yang dikhususkan untuk komoditas makanan diantaranya. Memberikan program berupa pelatihan membuat kemasan yang menarik bagi para pelaku UMKM, sehingga dalam proses pengemasan produk-produknya akan dapat menambah daya jual dan daya tarik tersendiri bagi para konsumen. Karena dalam kemasan pun menjadi hal yang cukup penting untuk diperhatikan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya program pemberian Sertifikasi Halal yang nantinya bisa dimiliki oleh para pelaku UMKM tanpa harus membayar apapun dalam pelaksanaannya. Mekanisme dari program ini adalah dengan menyeleksi pelaku UMKM yang sudah mempunyai berbagai izin kemudian dipilih lagi oleh pihak dari Dinas Koperasi dan UMK yang nantinya direkomendasikan untuk mendapatkan label Sertifikasi Halal tersebut.

Program Pengembangan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan berwirausaha untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan menghadapi perubahan tatanan

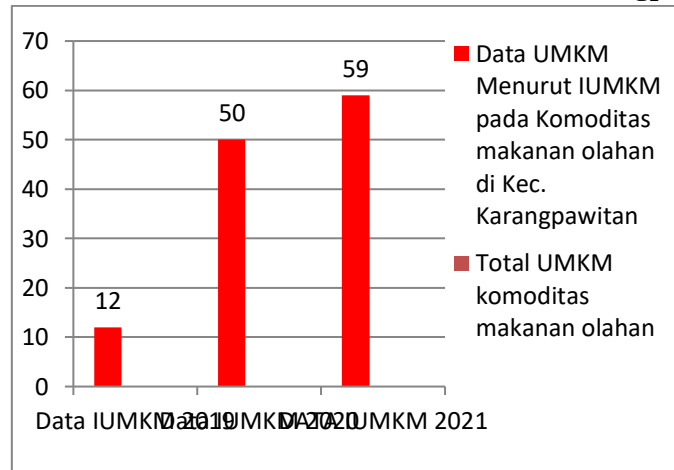
perekonomian di Kabupaten Garut agar lebih maju dan berkembang.

Dari penjelasan program diatas, Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan pembinaan tersebut dalam waktu satu tahun sekali, dimana dalam tiap tahunnya sekitar 30 UMKM se-Kabupaten Garut yang sudah dipilih oleh Oleh Dinas Koperasi dan UMKM

Kabupaten Garut berdasarkan kelengkapan izin, akan mendapatkan pembinaan berupa program yang sudah dijelaskan diatas.

Berikut ini data gambar perkembangan dan peningkatan Pelaku usaha yang mendaftar untuk mendapatkan IUMKM dengan komoditas usaha Makanan Olahan Di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

Gambar : Data Pendaftar IUMK di Kecamatan Karangpawitan



Sumber : Data IUMK Dinas Koperasi & UMK Kabupaten Garut

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun pertama diselenggarakannya program pembinaan UMKM yaitu tahun 2019 menunjukkan adanya sekitar 12 UMKM yang mendaftar untuk mendapatkan IUMK di kecamatan Karangpawitan kemudian pada tahun selanjutnya peningkatan mulai terlihat dengan adanya 50 UMKM yang mendaftar untuk mendapatkan IUMK di kecamatan karangpawitan dan pada tahun 2020 sekarang terlihat kembali adanya peningkatan pendaftar IUMK di tahun 2021 jumlahnya 59 UMKM yang mendaftar untuk mendapatkan IUMK tersebut.

Teori yang digunakan sebagai alat analisis menggunakan teori “ Evaluasi

Program model CIPP”. Teori Evaluasi Program model CIPP “Stufflebeam. Model CIPP ini melihat Kepada empat dimensi yaitu :

- 1) Dimensi Context
- 2) Dimensi Input
- 3) Dimensi Proses
- 4) Dimensi Product

Menurut Stufflebeam (Mahmudi, 2011:114) unsur yang pertama adalah dimensi context yang utamanya mengarah pada identifikasi kelemahan dan kekuatan pada badan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Evaluasi dimensi context bertujuan untuk menilai apakah tujuan dan prioritas yang telah ditetapkan sudah memenuhi

kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi.

Kedua, dimensi Input yang bertujuan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan yang dirasakan perlu dirubah. Ketiga, dimensi proses yang bertujuan untuk memberikan masukan pada pengelola tentang kesesuaian terhadap pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya, kemudian bertujuan untuk meng-efisienkan penggunaan sumber daya yang ada.

Keempat, dimensi Product bertujuan untuk mengukur dan menilai pencapaian dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Lebih jelasnya evaluasi dimensi produk bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran organisasi dan program.

Menurut Stufflebeam (dlm Iskandar, 2016:18) bahwa evaluasi konteks, menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan. (Muryadi, 2017:5) Model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) merupakan model evaluasi dimana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki.

Menurut Nana Sudjana & Ibrahim (dml Muryadi, 2017:5) Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut :

a. Evaluasi Context ,Situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan.

b. Evaluasi Input , Kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan.

c. Evaluasi Process ,Pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa yang telah ditetapkan.

d. Evaluasi Product , Hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut.

Meskipun dari pihak pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan dan melahirkan program berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat daerah khususnya dibidang ekonomi yaitu pembinaan terhadap pengusaha kecil. masih terdapat beberapa masalah yang ada dalam proses pelaksanaan pembinaan tersebut yakni, dalam hal pendataan untuk mendapatkan Izin Usaha Mikro, Kecil, Menengah atau disingkat IUMK masih terhambat dikarenakan ketidaktahuan dari masyarakat atau pelaku usaha bahwa ada program untuk mempermudah mendapatkan IUMKM dengan cara berkoordinasi dengan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut agar dapat mendaftarkan usahanya. Kemudian terbatasnya Sumber Daya Manusia di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut membuat proses pendataan yang dilakukan Dinas tersebut menjadi terhambat, tidak efektif dan tidak efisien.

Selanjutnya dalam teknis pelaksanaan pemberian label Sertifikasi Halal dan label HaKI masih selektif dan tidak terlalu dipublikasikan kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Garut termasuk di Kecamatan Karangpawitan, dikarenakan dana yang belum cukup dan dari segi kesiapan pegawai pun mungkin belum memadai untuk dapat mengurus seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Garut, yang seharusnya setiap program

yang diturunkan oleh para pembuat kebijakan agar dapat diimplementasikan dan sampai kepada seluruh sasaran kebijakan. Kemudian penunjukkan pendamping dalam program pembinaan UMKM yang masih kurang dalam pelaksanaan kinerjanya, itu tentunya dapat mempengaruhi situasi yang menjadi tidak kondusif dilingkungan organisasi UMKM

Karena dengan adanya pendamping seperti yang disebutkan diatas, maka ilmu-ilmu yang harusnya diserap dan diterima oleh pelaku UMKM akan menjadi tidak efektif dan efisien. Adapula laporan dari beberapa pelaku UMKM yang menyebutkan bahwasanya ada oknum dari pendamping UMKM yang “nakal” saat mengurus surat izin usaha, yang seharusnya pelaku usaha itu mendapatkan surat izin usaha yang lengkap, namun berbanding terbalik dengan yang didapatkannya.

Meskipun demikian, perkembangan UMKM di Kecamatan Karangpawitan dari mulai diturunkannya program pembinaan kegiatan UMKM dari tahun 2017 sampai 2019 sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Tentunya jumlah 121 UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya akan mendapatkan izin tersebut, akan tetapi untuk dapat mengikuti program pembinaan UMKM itu hanya UMKM yang terpilih oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut, karena ternyata masih banyak sekali pelaku usaha UMKM yang masih belum melengkapi izin usaha selain IUMK.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif. Deskriptif dengan focus penelitian yaitu mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan kegiatan UMKM di Kecamatan

Karangpawitan Kabupaten Garut. meliputi: (1) evaluasi konteks (context); (2) evaluasi masukan (input); (3) evaluasi proses (process); dan (4) evaluasi hasil (product).

1. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Instrumen kunci adalah peneliti sendiri yang akan menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan dari data yang ditemukan di lapangan mengenai partisipasi masyarakat dalam pencegahan *stunting*.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, yaitu :

- a) Dua orang pegawai di Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Garut.
- b) Satu orang Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

c) Enam orang masyarakat pelaku UMKM
Yang terbagi ke dalam 3 orang pelaku UMKM telah mendapatkan program pembinaan dan 3 orang belum mendapatkan pembinaan..

2) Sumber data sekunder adalah berupa data-data atau catatan tentang UMKM di Kecamatan Karang Pawitan

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui :
 - 1) Wawancara yang dilakukan terhadap informan untuk menjawab permasalahan penelitian yaitu Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di kabupaten Garut.
 - 2) Observasi langsung untuk memperoleh informasi dengan melihat atau merasakan langsung pembinaan UMKM di Kabupaten Garut.
 - 3) Study Dokumentasi berupa catatan, data dan hasil rekaman, berupa informasi-informasi yang membuktikan deskripsi. Evaluasi Progra Pembinaan Kegiatan UMKM di Kcamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
4. Teknik Analisis Data
Peneliti menggunakan teknik analisis menggunakan model Evaluasi CIPP yaitu *context, input, process dan product yang* dikembangkan oleh Stuffleben.
5. Pengujian Keabsahan Data
Untuk menguji keabsahan data dilaksanakan uji kredibilitas melalui peningkatan ketekunan dengan perpanjanagn pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan mengenai evaluasi pelaksanaan program pembinaan UMKM...
6. Lokasi dan Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 sampai Juni 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana telah diuraikan dalam bab I yakni bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan tentang Evaluasi terhadap Program pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut dengan model Evaluasi CIPP, 2) Mendeskripsikan dampak yang muncul akibat dari adanya program pembinaan UMKM.

Deksripsi hasil observasi dan wawancara dapat dilihat melalui paparan sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Kegiatan UMKM di Kecamatan Karangpawitan

Peneliti mengajukan delapan indikator pertanyaan terkait program pembinaan kegiatan UMKM dengan mengacu pada Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2016 tentang Tupoksi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut, yang mana unuk mencapai suatu UMKM yang maju maka suatu program harus memperhatikan antara lain, (1) Tujuan Program pembinaan, (2) Regulasi Program Pembinaan,(3) Fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Garut,(4) Perencanaan Program,(5) SDM Aparatur,(6) Program pembinaan yang sistematis dan berkelanjutan,(7) Kreatifitas pelaku UMKM, (8) Tertib izin Pemasaran.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi bahwa tidak semua pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Karangpawitan mendapatkan program pembinaan tersebut.. Pelaksanaan Program Pembinaan dilakukan setiap tahun anggaran. Program pembinaan yang dilakukan berupa pelatihan-pelatihan tentang kewirausahaan, antara lain berupa :

a. Program pelatihan kemasan produk Dinas Koperasi dan UMKM dalam upaya peningkatan kualitas, nilai tambah serta daya saing produk usaha mikro pelaku UMKM Kecamatan Karangpawitan melalui fasilitasi kegiatan pengembangan inovasi dan kreasi bentuk serta desain kemasan produk UMKM dengan menggunakan sumber dana dari DAU APBD sebesar RP. 89.697.500 berlokasi di Banyu Alam Resort Hotel (Cipanas), dengan peserta sebanyak 30 orang dengan kriteria yaitu : 1) Usaha Mikro yang telah berjalan di atas 6 Bulan, 2) Produk milik sendiri dan dapat dipasarkan, 3) telah memenuhi standar keamanan /sajian produk, 4) memiliki IUMK dan atau P-IRT Melalui pelatihan ini diharapkan para pelaku UMKM dapat merubah mindset para pelaku UMKM akan pentingnya kemasan yang baik dan kreatif yang tentunya secara langsung dapat menggandakan keuntungan mereka nantinya. Kemudian para pelaku UMKM diharapkan mampu mengimplementasikan materi pelatihan sehingga mampu mewujudkan wirausaha yang kreatif dan inovatif, sehingga memberikan nilai ekonomis.

Gambar : Kegiatan Pelatihan dan Desain Kemasan Produk UMKM



b. Program Sertifikasi Halal. Kegiatan ini merupakan program

pemberian sertifikasi halal bagi para pelaku usaha bekerjasama dengan LPPOM MUI agar produk yang dihasilkan dapat dinyatakan sebagai produk yang halal dan tersertifikasi, tujuan program pemberian sertifikasi halal ini adalah untuk : 1) Memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro untuk mendapatkan Sertifikasi Halal secara gratis; 2). Mendukung terwujudnya Kabupaten Garut sebagai Kabupaten Halal; dan 3). Menyediakan Sarana Promosi dan Pemasaran bagi Produk Usaha Mikro yang telah Tersertifikasi Halal. Anggaran dari pelaksanaan program Sertifikasi Halal ini berasal dari DAU APBD Kabupaten Garut sebesar Rp. 77.032.000 yang dialokasikan untuk program Sertifikasi Halal ini dengan peserta sebanyak 30 orang dan dilaksanakan di Gedung Parigel. Dengan bentuk pelaksanaan pembinaan meliputi : penyuluhan tata cara pengisian Sistem Jaminan Halal. dengan nara sumber dari LPOM-MUI.

Gambar : Penyerahan Simbolis Sertifikat halal bagi Pelaku UMKM oleh Bupati Garut.



Bedasarkan pernyataan yang diungkapkan oleh Kasi Promosi & Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro Bapak Yadi Arriyadi menyatakan : "Sertifikasi Halal ini bisa disebut juga surat izin komersil , untuk dapat sertifikasi halal, pelaku usaha tersebut harus mempunyai dahulu PIRT, itu juga diprosesnya secara online. Sekarang tidak ada alasan lagi untuk pelaku usaha tidak punya PIRT tersebut,

karena pada saat ini Undang-Undang mewajibkan untuk ikut dikoridor halal". (wawancara tanggal 8 Mei 2020).

c. Program Pelatihan Kewirausahaan

Program Pengembangan UMKM melalui pelatihan kewirausahaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan berwirausaha untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan menghadapi perubahan tatanan perekonomian di Kabupaten Garut khususnya di Daerah Kecamatan Karangpawitan agar lebih maju dan berkembang. Mengingat pentingnya peranan Usaha Mikro dalam perekonomian daerah, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan dan peran Usaha Mikro dalam pengembangan ekonomi. Salah satu bentuk program tersebut adalah Penyelenggaraan pelatihan Kewirausahaan dengan fasilitasi pengembangan usaha melalui pelatihan Achievement Motivation Training (AMT). Diharapkan kegiatan ini dapat membangun jiwa kewirausahaan, wawasan serta menambah cakrawala berfikir para pelaku Usaha Mikro, Tujuan dilaksanakannya program Pelatihan Kewirausahaan ini adalah: 1). Untuk menumbuhkembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan pelaku UMKM; 2) Meningkatkan semangat prestasi pelaku UMKM dalam berkegiatan usaha yang didukung oleh kreasi dan inovasi. Anggaran yang digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan ini sebesar Rp. 151.200.000 yang berasal dari DAU APBD Kabupaten Garut, dengan nara sumber dari Tim dari PT.Cipta Bangun Energi, kegiatan ; teori dan praktek, tempat pelaksanaan berlokasi di Bumi Batara Adventure Camp Bayongbong, pada tanggal 13 s/d 15

Februari 2019. Dengan terlaksananya program pelatihan kewirausahaan ini, diharapkan para pelaku UMKM bisa menyadari pentingnya seluruh aspek usaha manajemen mulai dari Dinamika kelompok, motivasi serta problem solving agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya.

Gambar : Pelatihan Kewirausahaan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut



d. Pendataan dan Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Izin Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu upaya pengembangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil oleh Pemerintah melalui kemudahan pemberian izin operasional usaha yang diterbitkan di Kecamatan sesuai dengan domisili usaha. Kegiatan Pendataan dan Pemetaan UMKM melalui Pemantapan Penerbitan IUMK Tahun Anggaran 2019, adapun tujuan dari diselenggarakannya program ini adalah: 1). memfasilitasi petugas kecamatan terkait optimalisasi pelaksanaan penerbitan IUMK; 2). Memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan kapasitas, perlindungan dan pendamping usaha; 3). Memfasilitasi pelaku UMKM untuk meningkatkan kemudahan dalam akses pembiayaan. Sumber dana untuk pelaksanaan program ini berasal dari dana DAU APBD Kabupaten Garut sebesar Rp. 77.400.000,-. Dimana hasil dari keikutsertaan para pelaku UMKM pada kegiatan ini diantaranya mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam ber-usaha dilokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan

pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan lembaga keuangan bank dan non-bank dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Promosi dan Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro Bapak Yadi Arriyadi sebagai salah satu informan pokok pada penelitian ini menyatakan bahwa: “Izin penting dan proses nya pun mudah, jadi saat ini tidak ada alasan untuk tidak mempunyai izin. sekarang izin bisa ditempuh dengan cara online, kalau misalnya tidak bisa mengakses internet di rumah bisa datang ke kantor BPNPT bisa dibantu untuk diterbitkan izin operasional, namanya IUMK atau Izin Usaha Mikro Kecil, nah izin tersebut untuk pelaku UMKM sebenarnya untuk perlindungan usaha atau aspek legal usaha dan identitas”. (wawancara tanggal 8 Mei 2020).

Dari beberapa program pembinaan dan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah daerah untuk mengembangkan UMKM lewat program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut khususnya di daerah Kecamatan Karangpawitan dalam Context (konteks) regulasi / aturan sudah dilakukan dan disosialisasikan kepada para pelaku UMKM. Akan tetapi pada dasarnya ,dalam birokrasi sekarang ini, aspek yang menjadi tujuan utama dari program itu hanya berupa laporan tentang sudah terlaksananya suatu program yang telah ditetapkan oleh aturan atau Undang Undang tanpa melihat tujuan utama sebenarnya dari diturunkannya program tersebut, yaitu untuk menciptakan hasil yang dapat dirasakan oleh sasaran program atau para pelaku UMKM.

2. Evaluasi Program Pembinaan kegiatan UMKM dengan Model CIPP

Model CIPP merupakan model yang berorientasi kepada pemegang keputusan. Model ini membagi evaluasi dalam empat macam, yaitu : evaluasi konteks (melayani keputusan dalam perencanaan), evaluasi input (untuk membantu mengatur keputusan menentukan sumber-sumber yang tersedia, serta prosedur kerja untuk mencapai tujuan yang dimaksud), evaluasi proses (membantu keputusan dalam melihat sampai sejauh mana program telah dilaksanakan), evaluasi produk (yaitu meninjau kembali keputusan apakah sudah tercipta hasil yang dirasakan dari keputusan).

a. Evaluasi Context (Konteks)

Menurut Stufflebeam (dlm Iskandar, 2016) bahwa evaluasi konteks, menghasilkan informasi tentang macam-macam kebutuhan yang telah diatur prioritasnya, agar tujuan dapat diformulasikan. Dari hasil observasi dan studi dokumentasi yang peneliti lakukan di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut, bahwa dari segi pelaksanaan program kerja dalam proses untuk mengembangkan kemampuan dari pelaku UMKM Kabupaten Garut sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dilihat dari laporan bidang pengembangan usaha Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut bahwasanya setiap kegiatan program pelatihan para pengusaha UMKM sudah terlaksana dengan sistematis, yang diawali dengan Program peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama UMKM yang dilaksanakan pada tanggal 21 s/d 24 februari 2019 dan bertempat di area Pendopo Kabupaten Garut.

Gambar : Kegiatan Peningkatan jaringan

kerjasama UMKM



Sumber: Laporan Bidang Pengembangan Usaha

Kemudian dilanjutkan pada program penciptaan iklim UMKM yang kondusif yang dilaksanakan pada tanggal 09 s/d 11 Oktober 2019 dan bertempat di Banyu Alam Resort Hotel. Dilanjutkan dengan program Fasilitasi Pengembangan UMKM / pemberian sertifikasi halal bagi UMKM, yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 yang bertempat di gedung Parigel.

Gambar : Kegiatan program penciptaan iklim UMKM yang kondusif



Sumber: Laporan Bidang Pengembangan

Dari program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut diatas, dapat dikatakan bahwa Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut sudah sejalan dengan tujuan RENSTRA Kabupaten Garut 2014-2019. Akan tetapi kita tidak boleh hanya melihat pada proses pelaksanaannya saja, harus juga melihat pada pencapaian hasil yang didapat dari program - program ini apakah sudah tepat sasaran dan berhasil

atau belum. Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan kepada salah satu Kepala Bidang UKM Bapak Asep Dedi menyatakan bahwa : “Dalam setiap pelaksanaan program yang telah ditetapkan sesuai dengan RENSTRA Kabupaten kemudian diterjemahkan oleh Dinas Koperasi & UMK, tentunya kami selaku pelaksana kebijakan inginnya semua program yang dicanangkan dan direncanakan berjalan sesuai dengan tujuan dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut dan sejalan dengan RENSTRA Kabupaten, akan tetapi dalam setiap pelaksanaan program tersebut pasti terdapat hal lain seperti uncontrol factor yang mana tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi proses dari pelaksanaan atau proses implementasi dari program ini. (wawancara tanggal 8 Mei 2020).

Sejalan dengan pernyataan dari Pelaku UMKM di daerah Kecamatan Karangpawitan, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bapak Edwin Januar sebagai pemilik usaha makanan olahan di Kecamatan Karangpawitan yang bernama Moorena Food mengatakan bahwa: “Sebetulnya dalam pelaksanaan program pembinaan UMKM ini pihak dari Dinas Koperasi & UMK Kabupaten Garut sudah menunjukkan kinerja yang maksimal untuk melaksanakan program tersebut, akan tetapi yang menurut saya kurang dari Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Garut ini adalah penunjukan pendamping untuk program pembinaan yang masih dirasa kurang baik, terkadang oknum pendamping itu tidak sesuai dengan apa yang harus dikerjakannya, adapun oknum pendamping yang seharusnya melakukan kunjungan ke tempat UMKM tetapi mangkir dari

tanggung jawabnya dengan tidak melakukan kunjungan, kemudian dalam proses pembuatan izin PIRT terkadang masih ada oknum dari pendamping dan oknum dari Dinas Koperasi dan UMKM yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku.” (wawancara tanggal 16 Mei 2020).

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut dari segi regulasi atau aturan memang sudah diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dari segi pelaksanaan dilapangannya masih belum maksimal karena masih terdapat oknum-oknum dari pendamping dan oknum dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut yang tidak taat aturan dan malah mempersulit jalannya kegiatan para pelaku UMKM.

3. Evaluasi Input (Masukan)

Dalam Program Pembinaan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan terdapat sumber-sumber Input (masukan) antara lain :

a. Perencanaan Program

Perencanaan program ini berdasarkan Renstra yang dimaksudkan untuk memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut untuk meningkatkan perekonomian daerah dari perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD.

Dalam perencanaan program, Dinas Koperasi & UMK Kabupaten Garut mempunyai target tiap tahunnya untuk dapat mencapai program pembinaan yang hasilnya bisa dikatakan sukses dengan cara berusaha memunculkan ide-ide baru dalam program pembinaan UMKM supaya para pelaku UMKM dapat terlecut semangatnya

untuk mencoba mengikuti program pembinaan UMKM khususnya di Kecamatan Karangpawitan. Kemudian dari para pelaku UMKM juga ikut serta dalam proses perencanaan tersebut dengan munculnya ide-ide atau inovasi program baru yang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut. Keikutsertaan para pelaku UMKM dalam perencanaan program pembinaan pun dikarenakan para pelaku UMKM ini berperan penting khususnya dari perspektif kesempatan kerja, sumber pendapatan, pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi daerah.

Secara umum, proses dalam perencanaan program terdapat beberapa indikator didalamnya seperti Input, Output dan Outcome. Menurut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Promosi dan Kemitraan UKM Kabupaten Garut Bapak Yadi Arriyadi mengatakan bahwa: “didalam perencanaan ada indikator yang berperan dalam perencanaan diantaranya Input, output dan outcome, didalam input berupa SDM dan anggaran program pembinaan, kemudian pada Output-nya seperti sudah terlaksananya kegiatan pelatihan kewirausahaan, kemudian pada Outcome-nya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu meningkatkan kemampuan usahanya”. (wawancara tanggal 8 Mei 2020)

b. Sumberdaya Manusia Aparatur

Dalam menjalankan program pembinaan kegiatan UMKM, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Garut hanya memiliki 35 orang pegawai yang harus mengurus UMKM se-Kabupaten Garut, berbanding terbalik dengan jumlah Pelaku usaha di Kabupaten Garut yang berkisar 50.000 UMKM termasuk di Kecamatan Karangpawitan juga jumlah pelaku usaha

terbilang cukup banyak dengan data yang disebutkan oleh Kecamatan Karangpawitan ada sekitar 2.970 dengan berbagai komoditas atau jenis usaha, tentunya dilihat secara kuantitas Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut merasa kekurangan pegawai untuk bisa mengurus semua pelaku UMKM tersebut. Menurut Kepala Bidang UMK Bapak Asep Dedi mengatakan bahwa: “Kalau secara kompetensi ya saya rasa memenuhi baik dari segi akademik atau pendidikan ada yang sudah S1 dan S2, kemudian dari segi pengalaman sudah banyak yang senior, termasuk saya sudah sekitar 10 tahun. Nah kalau dari segi kuantitas menurut analisis kepegawaian, kita jujur masih kekurangan, kalau kualitas Insya Allah pegawai kami sudah memenuhi standar.” (wawancara tanggal 8 Mei 2020) keterbatasan jumlah aparat masih merupakan hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga belum mampu menjangkau ke keseluruhan wilayah Kabupaten Garut termasuk Kecamatan Karangpawitan. Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Seksi PMD kecamatan Karangpawitan Bapak Komarudin, S.IP., M.Si. bahwa keterbatasan jumlah aparat merupakan salah satu faktor penghambat pelaksanaan upaya pembinaan UMKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Karangpawitan. Sementara itu, secara kualitas SDM Aparatur telah memenuhi persyaratan kompetensi, dimana berlatar belakang pendidikan formal yang mayoritas Sarjana. Selain itu keikutsertaan dalam pendidikan non formal berupa diklat-diklat industri yang sangat mendukung pekerjaan. Sebagaimana disampaikan oleh Tjiptoherijanto (dalam Iskandar, 2016) kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan publik lebih sering disebabkan oleh faktor-

faktor internal, yaitu kurangnya daya dukung administrasi terhadap pelaksanaan kebijakan publik, yang mencakup struktur organisasi, kemampuan manajerial, kemampuan keuangan serta jumlah dan kualitas SDM yang tersedia.

c. Sarana dan Prasarana / Fasilitas

Dalam menyelenggarakan pelatihan, Dinas koperasi dan UKM telah memberikan sarana dan prasarana atau fasilitas yang cukup memadai diantaranya: 1).gedung pelatihan dan hotel yang disediakan untuk kegiatan penyampaian materi pelatihan, dilengkapi sarana penunjang seperti: ATK, meja dan kursi peserta, proyektor, laptop. 2). narasumber / pelatih yang berkompeten sesuai dengan bidang usahanya; 3).metode pembelajaran yang dikombinasikan metode ceramah dan interaktif, seminar; 4).waktu pelatihan yang cukup antara teori dan praktek. Selain itu ada juga fasilitas yang diberikan oleh Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut berupa pemanfaatan mobil promosi untuk memasarkan produk UMKM pada spot strategis dilingkup lokal, regional dan nasional. Untuk peserta penerima fasilitas halal dan haki sebanyak 30 orang se Kabupaten Garut

Kemudian selain fasilitas yang disebutkan diatas, ada juga capaian atau hasil yang didapatkan setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut yaitu pelaku usaha didaftarkan dan dibantu untuk mendapatkan fasilitas halal dan Hak merk, kemudian proses pembuatannya juga gratis tidak dipungut biaya apapun. Selanjutnya berbicara tentang fasilitas pemberian label HaKI, menurut Kepala seksi promosi dan kemitaaan Dinas koperasi dan UMK Kab Garut Bapak Yadi Arriyadi menyatakan bahwa: “pada prinsipnya setiap pelaku usaha berhak mendapatkan fasilitas dari Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut

cuma ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan, pertama fasilitas ini terbatas hanya 30 UMKM se-Kabupaten Garut tiap tahunnya, kedua jika disebut selektif, kalau secara kontekstual memang bisa dikatakan kita selektif, dalam artian begini, kita ingin mendorong atau memajukan pelaku usaha yang betul-betul ingin berkembang, jadi kalau kita asal menerima peserta dari mana saja takutnya mereka setelah menerima fasilitas dari Dinas Koperasi dan UKM Kab Garut, eh usahanya malah berhenti, jadi seperti itu artian selektifnya.” (wawancara tanggal 8 Mei 2020)

4. Evaluasi Process (Proses)

Berdasarkan informasi yang berhasil didapatkan pada hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut. secara umum, program ini dilaksanakan dalam jenis pelatihan teknis dan pelatihan non-teknis (manajerial), dimana jumlah pelatihan teknis yang diberikan lebih banyak, hal ini sudah tepat untuk mencapai tujuan program dalam meningkatkan keterampilan para pelaku UMKM serta berupaya meningkatkan pertumbuhan wirausaha baru.

Sedangkan pelatihan non-teknis bersifat manajerial diperuntukkan bagi pelaku usaha yang telah memiliki usaha. Menurut Wahjono (dlm Iskandar, 2016) menjelaskan langkah-langkah umum dalam proses pelatihan dan pengembangan, yaitu: (1) penilaian dan analisis kebutuhan, (2) desain program pelatihan, (3) pengembangan program pelatihan; (4) pelaksanaan dan penyampaian pelatihan; dan (5) evaluasi pelatihan.

Menurut Kepala seksi promosi & kemitraan UKM Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut menyatakan bahwa: “dalam pelaksanaan program pembinaan

kami menjalankan program ini dari awal bulan sampai dengan akhir bulan atau setiap tahun anggaran, itu artinya pelaksanaan program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kemudian berbicara pemberian sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan oleh kami, setahu saya mereka (Pelaku UMKM) memanfaatkan fasilitas dengan maksimal, buktinya para pelaku UMKM yang sudah ikut dan menerima fasilitas sekarang berkerjasama dengan kita (Dinas Koperasi dan UMK) dengan membuat komunitas bernama PARIGEL, dimana dalam komunitas tersebut para pelaku UMKM melakukan kegiatan sharing bersama pelaku usaha yang lain.” (wawancara tanggal 18 Mei 2020).

Tentunya dengan adanya komunitas PARIGEL tersebut akan dapat menarik perhatian bagi para pelaku UMKM yang belum masuk komunitas untuk ikut bergabung dalam komunitas tersebut untuk mendorong para pelaku UMKM yang merasa kurang percaya diri dari segi teknik pemasaran kemudian berbagi cara atau tips-tips membuat produk yang baik

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa dalam Process pelaksanaan program pembinaan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut melaksanakannya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Karangpawitan. Pemanfaatan fasilitas yang diberikan juga dipergunakan dengan baik oleh para pelaku UMKM dimulai dengan membuat komunitas dengan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut.

5. Evaluasi Product (Hasil)

Wujud hasil dari program ini adalah penyelenggaraan kegiatan pembinaan UMKM yang memfasilitasi kebutuhan

pelaku UMKM di Kabupaten Garut khususnya di Kecamatan Karangpawitan yang bertujuan:(1) meningkatkan keterampilan,kreativitas SDM pelaku UMKM dan menumbuhkan calon wirausaha baru; (2) kemudian menumbuhkan keinginan untuk tertib izin operasional dan komersil para pelaku UMKM. Menurut Kepala seksi promosi & kemitraan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menyatakan bahwa:“dalam pelaksanaan program pembinaan kami dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut menjalankan program ini dari awal bulan sampai dengan akhir bulan atau setiap tahun anggaran, itu artinya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kemudian berbicara pemberian sarana dan prasarana atau fasilitas yang diberikan oleh kami, setahu saya mereka (Pelaku UMKM) memanfaatkan fasilitas dengan maksimal, buktinya para pelaku UMKM yang sudah ikut dan menerima fasilitas sekarang berkerjasama dengan kita (Dinas Koperasi & UMK) dengan membuat komunitas bernama PARIGEL, dimana dalam komunitas tersebut para pelaku UMKM melakukan kegiatan sharing bersama pelaku usaha yang lain.” (wawancara tanggal 18 Mei 2020).

Tentunya dengan adanya komunitas PARIGEL tersebut akan dapat menarik perhatian bagi para pelaku UMKM yang belum masuk komunitas untuk ikut bergabung dalam komunitas tersebut. Kemudian kegiatan yang dilakukan dalam komunitas PARIGEL tersebut yaitu untuk mendorong para pelaku UMKM yang merasa kurang percaya diri dari segi teknik pemasaran kemudian berbagi cara atau tips-

tips membuat produk yang baik

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa dalam Process pelaksanaan program pembinaan, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut melaksanakannya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Pemanfaatan fasilitas yang diberikan juga dipergunakan dengan baik oleh para pelaku UMKM dimulai dengan membuat komunitas dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.

6. Evaluasi Product (Hasil)

Wujud hasil dari program ini adalah penyelenggaraan kegiatan pembinaan UMKM yang memfasilitasi kebutuhan pelaku UMKM di Kabupaten Garut yang bertujuan: (1) meningkatkan keterampilan, kreativitas SDM pelaku UMKM dan menumbuhkan calon wirausaha baru; (2) kemudian menumbuhkan keinginan untuk tertib izin operasional dan komersil para pelaku UMKM dari tiap daerah di Kabupaten Garut termasuk daerah Kecamatan Karangpawitan. Selanjutnya adapula Inovasi baru yang dihasilkan dari program pembinaan kegiatan UMKM ini diantaranya :

a. SIAPP UMKM (Sistem Informasi dan Aplikasi Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM), Merupakan Kegiatan Pemutakhiran Data UMKM yang didasarkan pada Penerbitan IUMK, disajikan dalam Mobile Website yang memuat informasi program Dinas dan fasilitas bagi UMKM, offline consultation, mapping potensi dan keragaan UMKM di 42 Kecamatan di Kabupaten Garut. Inovasi ini bertujuan untuk mendapatkan Database UMK yang akurat dan handal yang dijadikan sebagai dasar prioritas pengambilan keputusan dan kebijakan pembinaan

UMKM.

- b. GEMPUR UMKM (Gerakan Menuju Perubahan UMKM), Setelah terpetakan Keragaan dan Potensi UMKM, maka ditindaklanjuti oleh Gerakan Menuju Perubahan UMKM yaitu berupa Mobile Consultation dengan formulasi treatment pembinaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan UMKM di tiap-tiap Kecamatan dalam bidang Kewirausahaan, Kelembagaan Usaha, Manajemen Usaha, Legalitas Usaha serta Akses Permodalan dilaksanakan melalui pendekatan sentra, klaster dan kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bisnis UMKM dalam menghasilkan produk yang inovatif, memenuhi standar dan berdaya saing
- c. UMKM On The Spot (Pemasaran Produk UMKM di lokasi strategis pada waktu tertentu, Produk UMKM yang inovatif, memenuhi standar dan berdaya saing akan difasilitasi peningkatan jaringan pemasarannya melalui Kegiatan UMKM On The Spot. Kegiatan ini berupa Mobile and Networking Promotion. Mobile Promotion didukung oleh pemanfaatan Mobil Promosi untuk memasarkan produk UMKM pada tempat strategis dilingkup lokal, regional dan nasional. Networking Promotion berupa pemasaran produk UMKM melalui aplikasi website yang memungkinkan terjadinya transaksi jual beli produk UMKM di level grosir.

Dalam perjalanan inovasi tersebut, muncul pemikiran dari pihak Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut bahwasanya pelayanan publik melalui inovasi kepada para pelaku UMKM haruslah dikemas dalam suatu Brand yang

dapat lebih mendekatkan pelayanan publik kepada para pelaku UMKM, sehingga kedepannya pula para pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pelayanan tersebut akan merasa memiliki dan menjaga serta turut berkontribusi untuk mengembangkannya. Maka munculah istilah PARIGEL. Parigel terbuka dan mengajak para pelaku Usaha Mikro Kabupaten Garut termasuk daerah Kecamatan Karangapawitan untuk bergabung dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, dengan persyaratan :

1. Usaha Mikro milik perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki legalitas usaha IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil);
2. usaha Mikro dengan jenis usaha Makanan Olahan, Minuman Olahan, Kerajinan, Fashion, Jasa, Kuliner dan lainnya.
3. Memenuhi standar produk maupun standar kemasan, untuk produk makanan olahan;
4. Kreatif, Inovatif dan Proaktif berperan secara berkesinambungan mengembangkan Parigel.
5. Pendaftaran dapat dilakukan secara online di www.parigel.com atau menghubungi Admin Parigel.

Manfaat yang dirasakan atau diraih dari adanya inovasi ini adalah :

1. Meningkatnya daya saing usaha mikro secara komparatif dan kompetitif serta bertambah luasnya jaringan pemasaran produk usaha mikro;
2. Kemampuan manajerial usaha mikro mengalami peningkatan dalam bidang strategi promosi dan pemasaran;
3. Dikenalnya dan semakin kuatnya citra produk usaha mikro sebagai produk lokal yang inovatif dan berkualitas tinggi.

Kemudian dalam pengurusan izin

operasional dan izin komersil, masih ada oknum-oknum dari pendamping atau dari Dinas Koperasi & UMKM, apabila pelaku UMKM ingin mendaftarkan usaha-nya, biaya dari pendaftaran itu sedikit berbeda dengan apa yang telah ditentukan. Tentunya apabila kejadian ini terus berlanjut, maka kepercayaan dari para pelaku UMKM bisa berkurang dan bahkan pelaku UMKM menjadi takut untuk mendaftar izin operasional dan izin komersil, karena biaya yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan apa yang mereka dapat nantinya.

Dari penjelasan diatas dapat

disimpulkan pada evaluasi hasil menunjukkan bahwa tujuan program berupa peningkatan keterampilan sudah lumayan optimal dengan munculnya ide-ide baru dari para pelaku UMKM itu menandakan bahwa tujuan program pembinaan sudah dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, sedangkan pada tujuan untuk tertib izin operasional dan komersil masih belum tercapai dikarenakan masih belum menunjukkan sikap atau kinerja yang baik.

Tabel : Matriks Hasil Evaluasi

CONTEX	INPUT	PROCESS	PRODUCT
Tujuan dan sasaran pada proses pelaksanaan program pembinaan kegiatan UMKM, untuk mengembangkan kemampuan dari PUMKM Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Dari segi perencanaan, program kegiatan sudah sesuai dengan target tiap tahunnya. Kemudian dari para PUMKM pun ikut serta dalam proses perencanaan yang mana hal tersebut akan memberikan dampak positif bagi PUMKM. • Dari segi SDM aparatur, pegawai Dinas masih kekurangan Pegawai. • Dari segi Sarana/Fasilitas, dipergunakan 	Proses pelaksanaan program pembinaan kegiatan UMKM sudah sesuai dengan apa yang PUMKM butuhkan. Seperti pelatihan teknis dan pelatihan non teknis, pelaksanaan program pembinaan dilakukan pada bulan Februari, April, Agustus, Oktober dan November.	Tujuan program berupa peningkatan keterampilan sudah lumayan optimal dengan munculnya ide- ide baru dari para pelaku UMKM itu menandakan bahwa tujuan program pembinaan sudah dapat dirasakan oleh pelaku UMKM.

	dengan baik oleh para PUMKM.	Dari segi pendamping di Dinas Koperasi & UKM Kab.Garut harus diberi pelatihan kembali sebelum terjun untuk medampingi para PUMKM.	
--	------------------------------	---	--

Sumber : Oleh Peneliti 2020.

7. Dampak Program Pembinaan Terhadap Pelaku UMKM

a. Dampak Sosial

Dengan adanya program pembinaan kegiatan UMKM sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Garut termasuk Kecamatan Karangpawitan, memberikan rasa percaya diri bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Karangpawitan bahwa, mereka para pelaku UMKM yang berada di daerahpun bisa ikut bersaing dalam industri perdagangan skala daerah dan nasional, serta mendapatkan wadah / komunitas untuk para pelaku UMKM supaya bisa saling bertukar pendapat terkait produk mereka masing-masing. Kemudian komunikasi dengan Pemerintah daerah pun berjalan baik dengan banyaknya para pelaku UMKM yang mulai tergerak untuk melengkapi Izin Operasional dan Komersil mereka dan bergabung dengan komunitas PARIGEL.

b. Dampak Ekonomi

Dari segi Ekonomi, adanya program pembinaan kegiatan UMKM ini membantu

para pelaku UMKM dari sisi promosi lebih dikenal oleh masyarakat dan tentunya omset para pelaku UMKM lambat laun akan bertambah. Kemudian para pelaku UMKM pun sekarang bisa menjual produk mereka lewat Aplikasi yang dibuat oleh Dinas Koperasi & UKM kabupaten Garut untuk membantu para pelaku UMKM agar bisa bersaing dengan e-commers lainnya. Aplikasi khusus untuk komunitas PARIGEL ini dibuat oleh salah satu mitra Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut demi mendukung terciptanya UMKM Kabupaten Garut yang sehat dan mandiri.

D. KESIMPULAN

1. Evaluasi program pembinaan usaha mikro,kecil dan menengah di ecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.

a. Pada Evaluasi Context (Konteks) menunjukkan bahwa program pembinaan kegiatan usaha mikro,kecil dan menengah di kecamatan karangpawitan kabupaten Garut telah sejalan dengan tujuan dari Dinas

Koperasi & UKM Kabupaten Garut dan sudah sejalan juga sesuai dengan RESNTRA Kabupaten.

- b. Pada Evaluasi Input (masukan) terdapat beberapa indikator didalamnya, meliputi: (1) Perencanaan program, dimana pada proses perencanaan program terdapat aspek yang harus diperhatikan agar aspek-aspek tersebut dapat terpenuhi sebagaimana semestinya. Aspek tersebut meliputi: Input, Output dan Outcome. Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut pada tahap ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut sudah memenuhi ketiga aspek tersebut. (2). SDM Aparatur, Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut masih merasa kekurangan dalam segi kuantitas pegawai, dimana jumlah pegawai yang ada hanya 35 orang saja. (3). Sarana dan Prasarana atau Fasilitas, yang diberikan oleh pihak Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Garut Khususnya di Kecamatan Karangpawitan sudah cukup memadai.
- c. Pada Evaluasi Process (Proses) Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di kabupaten Garut khususnya di kecamatan Karangpawitan. Fasilitas yang diberikan pun dipergunakan

dengan baik oleh para pelaku UMKM tersebut.

- d. Pada Evaluasi Product (Hasil) menunjukkan bahwa tujuan program berupa peningkatan keterampilan sudah cukup optimal dengan munculnya ide-ide baru dari para pelaku UMKM, itu menandakan bahwa tujuan program pembinaan sudah dapat dirasakan oleh pelaku UMKM, sedangkan pada tujuan untuk tertib izin operasional dan komersil masih belum tercapai dikarenakan masih terdapat oknum pendamping yang masih belum menunjukkan sikap atau kinerja yang baik.
2. Dampak adanya program pembinaan terhadap UMKM di Kabupaten Garut khususnya di kecamatan Karangpawitan.
Para pelaku UMKM saat ini bisa berinovasi dengan ilmu-ilmu yang mereka dapat pada pelatihan yang sudah mereka ikuti. Kemudian dari segi izin usaha pun para pelaku UMKM setidaknya sekarang sudah mempunyai Izin PIRT, IUMK, sertifikasi halal dan lainnya, dimana izin – izin tersebut diperlukan untuk identitas dan juga menjadi aspek legal usaha bagi para pelaku UMKM. Kemudian dari segi jaringan pemasaran, para pelaku UMKM sekarang mulai bermitra dengan Dinas Koperasi & UKM Kabupaten Garut untuk masalah pemasaran dan promosi, itu merupakan dampak yang sangat baik bagi para pelaku UMKM secara, pada saat ini persaingan untuk mengenalkan produk UMKM masih dikatakan kalah bersaing dengan pelaku usaha yang memakai jasa e-commers.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. 2017, Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA.
- Ali & Alam, F. 2012, Studi Kebijakan Pemerintah. Bandung: Refika Aditama.
- Basrowi, & Surwandi. 2008, Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bhakti, Y. B. 2017, Evaluasi Program Model CIPP Pada Proses Pembelajaran IPA. JIPFRI: Jurnal Inovasi Pendidikan Fisika dan Riset Ilmiah , 75-82.
- Bungin, B. 2007, Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.
- Creswell, John. 2010), Research Design Pendekatan Kualitatif,, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darojat. 2015. Model Evaluasi Program Pendidikan . Islamdina, Volume XIV , 1-28.
- French dan Bell dlm Thoah, 2003. Pembinaan Organisasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Glendoh, S. H. 2001. Pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil. Jurnal Management & Kewirausahaan, 4-5.
- Irawan, S. 2016, Jurnal Pendidikan Teknik Boga 2016. Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan UMKM oleh lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, 2.
- Iskandar, D. T. 2016. Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo. Journal of Public Sector Innovation, 18-19.
- Junanto, S. 2018, Evaluasi Program Pembelajaran di PAUD Inklusi dengan Model Context, Input, Process, and Product. INKLUSI: Journal of Disability Studies, 179-194.
- Mahmudi, I. 2011, CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. Jurnal At-Ta'dib.
- Munthe, Ashiong P. 2015, Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan. Scholaria 2015.
- Muryadi , A. D. 2017, Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi . Jurnal Ilmiah PENJAS, 5-6.
- Muyana, S. 2017, Context, Input, Process Product (CIPP): Model Evaluasi Layanan Informasi . Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling, 342-347.
- Nirwana, D. C., & Dkk. 2017, Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten E . Jurnal Administrasi Publik, 7-8.
- Patilima, H. 2014, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Purba, G. M. 2017, Peran Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM Di Kota Semarang (Studi Kasus Kampung Batik Kota Semarang. Jurnal Ilmu sosial dan ilmu politik, 9-10.
- Peraturan Bupati No 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut.
- Peraturan Daerah Nomor : 76 Tahun 2016 tentang pola dasar pembangunan di kabupaten Garut.
- Rencana Strategi BAPPEDA KABUPATEN GARUT 2014-2019
- Siagian, Sondang P. 2014. Administrasi Pembangunan konsep, dimensi dan

- strateginya. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Suharto, E. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: ALFABETA.
- Suryanegara, R. H. 2014, November 15. Model Evaluasi Kualitatif dan Kuantitatif. Retrieved Mei 12, 2020, from [Slideshare.net: https://www.slideshare.net](https://www.slideshare.net)
- Thoha, M. 2003. Pembinaan Organisasi Proses diagnosa & Intervensi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada .
- Umar, Z. 2017. Analisis Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas layanan publik di Daerah. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Publik*, 2.
- Undang – Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.